



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**



**Jalan Veteran No. 72, Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
LUMAJANG - 67316**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| COVER..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. GAMBARAN UMUM..... | 1 |
| 1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 1 |
| 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 3 |
| 1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah..... | 6 |
| 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana..... | 8 |
| 1.2. ISU STRATEGIS..... | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 11 |
| 2.1 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH..... | 11 |
| 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... | 13 |
| 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)..... | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 22 |
| 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 22 |
| 3.1.1. Pengukuran Kinerja..... | 22 |
| 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja..... | 25 |
| 3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025..... | 25 |
| 3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya..... | 28 |
| 3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra..... | 33 |
| 3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026..... | 33 |
| 3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029..... | 34 |
| 3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain..... | 35 |
| 3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja.. | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.2.5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan..... | 37 |
| 3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 43 |
| 3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja | 45 |
| 3.2. REALISASI ANGGARAN | 58 |
| 3.3. CAPAIAN KINERJA LAIN..... | 59 |
| 3.3.2. Penghargaan | 61 |
| 3.3.3. Inovasi | 61 |
| BAB IV PENUTUP | 63 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 1. 1 | Tabel Komposisi Pegawai | 7 |
| Tabel 1. 2 | Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025 | 8 |
| Tabel 2. 1 | Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan P-Renstra 2024-2026..... | 12 |
| Tabel 2. 2 | Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Renstra 2025-2029 | 13 |
| Tabel 2. 3 | Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 | 13 |
| Tabel 2. 4 | Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 | 14 |
| Tabel 2. 5 | Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)..... | 16 |
| Tabel 2. 6 | Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)..... | 19 |
| Tabel 3. 1 | Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja | 23 |
| Tabel 3. 2 | Capaian Kinerja Tahun 2025..... | 24 |
| Tabel 3. 3 | Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 25 |
| Tabel 3. 4 | Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 20218-2023)..... | 29 |
| Tabel 3. 5 | Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) | 30 |
| Tabel 3. 6 | Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029) | 31 |
| Tabel 3. 7 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 | 33 |
| Tabel 3. 8 | Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 | 35 |
| Tabel 3. 9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Provinsi Jawa Timur | 36 |
| Tabel 3. 10 | Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026..... | 42 |
| Tabel 3. 11 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 43 |
| Tabel 3. 12 | Realisasi Program dan Kegiatan..... | 46 |
| Tabel 3. 13 | Realisasi Anggaran Tahun 2025 | 58 |
| Tabel 3. 14 | Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Tahun Tahun Sebelumnya | 58 |

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 3. 15 | Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... | 60 |
|-------------|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 1. 1 | Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 |
| Gambar 3. 1 | Grafik Capaian Indikator per Tahun..... | 32 |
| Gambar 3. 2 | Penghargaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terbaik Tahun 2025 .. | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

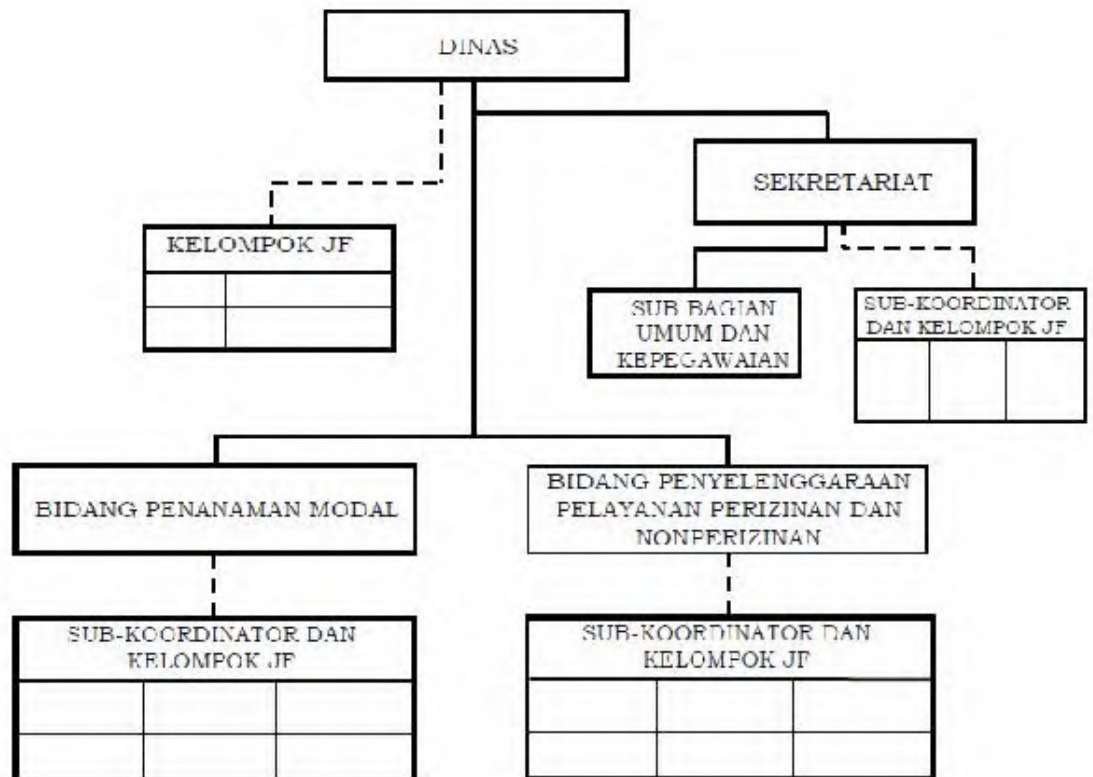
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

❖ **Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan

penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal;
- e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui SPIISE dan Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik);
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

❖ **Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan, Nonperizinan dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan serta pengelolaan data informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. pengoordinasian proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan;
- g. pengolahan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
- h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan nonperizinan;
- i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan penanganan pengaduan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 36 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tabel Komposisi Pegawai

| No | Jabatan Dalam Organisasi | Jenis Kelamin | | Status Kepegawaian | | | | Ijazah | | | | | | | Eselon | | | Ket. |
|--------|--------------------------|---------------|----|--------------------|------|-----|--------|--------|-----|-----|----|----|----|----|--------|---|---|------|
| | | L | P | PNS | CPNS | P3K | P3K PW | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 2. | Sekretaris | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 3. | Kepala Bidang | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| 4. | Kepala Sub Bagian | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 5. | Pejabat Fungsional | 4 | 2 | 6 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | |
| 6. | Pejabat Pelaksana | 8 | 18 | 5 | 1 | 1 | 19 | | 1 | 11 | 1 | 13 | | | | | | |
| 7. | Tenaga Kontrak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | 15 | 21 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 11 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, total pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2025 sebanyak 36 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 4 orang, pejabat fungsional sebanyak 6 orang, pejabat pelaksana sebanyak 26 orang, pejabat PNS sebanyak 15 orang, CPNS sebanyak 1 orang dan PPPK sebanyak 20 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan sebesar 42%:58% dengan pegawai laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 21 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1. 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN/ KONDISI BARANG |
|----|--|--------|--------|--|
| 1 | GOLONGAN TANAH | 1 | Unit | |
| 2 | GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN | 515 | Unit | Baik 241, Rusak Ringan 196, Rusak Berat 71 |
| 1 | Alat-Alat Besar | 3 | Unit | Baik 1, Rusak Ringan 2 |
| 2 | Alat-Alat Angkutan | 13 | Unit | Baik 4, Rusak Ringan 9 |
| 3 | Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur | 3 | Unit | Rusak Ringan |
| 5 | Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga | 340 | Unit | Baik 221, Rusak Ringan 88, Rusak Berat 31 |
| 6 | Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar | 13 | Unit | Baik 3, Rusak Berat 10 |
| 7 | Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan | 1 | Unit | Rusak Ringan 1 |
| 8 | Alat Laboratorium | 0 | Unit | |
| 9 | Alat Persenjataan/ Keamanan | 0 | Unit | |
| 10 | Komputer | 140 | Unit | Baik 10, Rusak Ringan 93, Rusak Berat 30 |
| 11 | Alat Eksplorasi | 0 | Unit | |
| 12 | Alat Pengeboran | 0 | Unit | |
| 13 | Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian | 0 | Unit | |
| 14 | Alat Bantu Eksplorasi | 0 | Unit | |
| 15 | Alat Keselamatan Kerja | 0 | Unit | |
| 16 | Alat Peraga | 0 | Unit | |
| 17 | Peralatan Proses/ Produksi | 0 | Unit | |

| NO | NAMA BARANG | | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN/ KONDISI BARANG |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| | 18 | Rambu Rambu | 2 | Unit | Baik 2 |
| | 19 | Peralatan Olah Raga | 0 | Unit | |
| 3 | GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN | | 7 | Unit | Rusak Ringan |
| 4 | GOLONGAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN | | 0 | Unit | |
| 5 | GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA | | 0 | Unit | |
| 6 | GOLONGAN KONTRUKSI DALAM Pengerjaan | | 0 | Unit | |
| JUMLAH TOTAL | | | 523 | Buah/Unit | |

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

- a. Kurangnya minat penanam modal dalam menanamkan modal di Kabupaten Lumajang;
- b. Kurangnya Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

- c. Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas penyelenggaraan pelayanan di sektor penanaman modal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkan P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029 , maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 → berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 → berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2. 1
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Berdasarkan P-Renstra 2024-2026

| No | Sasaran/ IKU | IKU Lama (SK 571/2023) | Satuan | Formulasi | Target 2025 | Keterangan Perubahan |
|----|---|---|--------|---|--------------|---|
| 1. | Tujuan Meningkatnya investasi inklusif | Nilai investasi | Juta | Nilai investasi | 1.282.684,40 | Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029) |
| 2. | Sasaran Meningkatnya jumlah penanaman modal skala kecil, menengah dan besar | Persentase peningkatan kegiatan usaha | % | Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N dikurangi Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N-1 dibagi Jumlah Kegiatan Usaha Skala Kecil, Menengah dan Besar tahun N-1 dikali 100 % | 7 | Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029) |
| 3. | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMA | Juta | Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) | 320.671 | Sasaran dan satuan berubah dengan indikator tetap |
| 4. | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMDN | Juta | Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 962.013,40 | Sasaran dan satuan berubah dengan indikator tetap |
| 5. | Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | Angka | Hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah | 87,5 | Tetap |

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Renstra 2025-2029

| No | Sasaran/IKU | IKU Baru (SK 405/2025) | Satuan | Formulasi | Target 2025 |
|----|--|---|----------------|---|-------------|
| 1. | Tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | Persen | Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100 | 10 |
| 2. | Sasaran Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | Triliun Rupiah | Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) | 0,146 |
| 3. | Sasaran Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | Triliun Rupiah | Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 2,495 |
| 4. | Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | Angka | Hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah | 86 |

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah.

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Awal
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|------------------------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Usaha | 7% |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 320.671 Juta |
| 3 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 962.013,4 Juta |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 87,5 |

| No | Program | Anggaran |
|----|---|---------------|
| 1. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 147.735.750 |
| 2. | Program Promosi Penanaman Modal | 167.581.000 |
| 3. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 112.407.500 |
| 4. | Program Pelayanan Penanaman Modal | 392.833.584 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.669.540.501 |
| | Jumlah | 4.490.098.336 |

Tabel 2. 4
Perubahan Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Perubahan |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah |
| 3 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 |

| No | Program | Anggaran Perubahan |
|----|---|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 127.070.750 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal | 44.648.000 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 103.763.250 |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 351.841.792 |
| 5. | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | 3.812.046.138 |
| | Jumlah | 4.439.369.930 |

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang

ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P-RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2. 5
 Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Awal 2025 | |
|----|--|---|-------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| 1 | Tujuan 1 Meningkatnya Investasi Inklusif | Nilai Investasi | 1.282.684,40 Juta | 820.557.834 |
| | 1. Sasaran 1 Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7 % | 147.735.750 |
| | a. Program 1 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Kebijakan Perencanaan Penanaman Modal Yang Ditetapkan | 57,89 % | 147.735.750 |
| | 1). Kegiatan 1 Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif | 50 % | 32.188.750 |
| | a). Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | 18.988.750 |
| | b). Sub Kegiatan 2 Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen | 13.200.000 |
| | 2). Kegiatan 2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun | Persentase Peta Potensi yang disusun | 50 % | 115.547.000 |
| | a). Sub Kegiatan 1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 26.000.000 |
| | b). Sub Kegiatan 2 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 89.547.000 |
| | 2. Sasaran 2 Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMA | 320.671 Juta | 167.581.000 |
| | a. Program 1 | Persentase Peningkatan penanam modal baru di | 2,5 % | 167.581.000 |

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Awal 2025 | |
|----|--|---|--------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| | Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal | Daerah | | |
| | 1). Kegiatan 1 Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 2 Kali | 167.581.000 |
| | a). Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 167.581.000 |
| | 3. Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMDN | 962.013,40 Juta | 112.407.500 |
| | a. Program 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LKPM | 80 % | 112.407.500 |
| | 1). Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal | 400 Kegiatan Usaha | 112.407.500 |
| | a). Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 100 Kegiatan Usaha | 13.517.500 |
| | b). Sub Kegiatan 2 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 100 Pelaku Usaha | 60.011.000 |
| | c). Sub Kegiatan 3 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | 38.879.000 |
| | 4. Sasaran 4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 | 392.833.584 |
| | a. Program 1 | Persentase Penerbitan Perizinan dan Non | 100 % | 392.833.584 |

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Awal 2025 | |
|----|---|---|---------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis | | |
| | 1). Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 19.856 Izin | 392.833.584 |
| | | Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 4.706 Non Izin | |
| | a). Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 25 Kegiatan Usaha | 1.350.000 |
| | b). Sub Kegiatan 2 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 10.000 Pelaku Usaha | 339.483.584 |
| | c). Sub Kegiatan 3 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100 pelaku usaha | 7.200.000 |
| | d). Sub Kegiatan 4 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 40 kegiatan usaha | 44.800.000 |

Tabel 2. 6
Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025)

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Perubahan 2025 | |
|----|---|---|----------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| 1 | Tujuan 1 Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 10 Persen | 627.323.792 |
| | 1. Sasaran 1 Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 171.718.750 |
| | a. Program 1 Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | 100 Persen | 127.070.750 |
| | 1) Kegiatan 1 Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif | 10 Persen | 14.751.750 |
| | a) Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | 11.046.250 |
| | b) Sub Kegiatan 2 Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen | 3.705.500 |
| | 1) Kegiatan 2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun | Persentase Peta Potensi yang disusun | 17 Persen | 112.319.000 |
| | a) Sub Kegiatan 1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 25.870.000 |
| | b) Sub Kegiatan 2 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 86.449.000 |
| | a. Program 2 Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 15,54 Persen | 44.648.000 |
| | 1) Kegiatan 1 Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang | Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 83 Pelaku Usaha | 44.648.000 |

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Perubahan 2025 | |
|----|---|---|----------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| | Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | | | |
| | a) Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 44.648.000 |
| | 2. Sasaran 2 Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 103.763.250 |
| | a. Program 1 Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 58 Persen | 103.763.250 |
| | 1) Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal | 200 Kegiatan Usaha | 103.763.250 |
| | a) Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 200 Kegiatan Usaha | 11.098.750 |
| | b) Sub Kegiatan 2 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 100 Pelaku Usaha | 59.850.000 |
| | c) Sub Kegiatan 3 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 100 Kegiatan Usaha | 32.814.500 |
| | 3. Sasaran 3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 | 351.841.792 |
| | a. Program 1 Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko | 1 Persen | 351.841.792 |
| | 1) Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 24.193 Izin | 351.841.792 |

| No | Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan | Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan | Perubahan 2025 | |
|----|--|---|---------------------|-------------|
| | | | Target | Anggaran |
| | Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 1.651 Non Izin | |
| | a) Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 1.350.000 |
| | b) Sub Kegiatan 2 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 21.602 Pelaku Usaha | 311.611.792 |
| | c) Sub Kegiatan 3 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 140 Pelaku Usaha | 7.200.000 |
| | d) Sub Kegiatan 4 Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 40 Kegiatan Usaha | 31.680.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan

menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

| No | Interval Nilai Capaian Kinerja | Kriteria Capaian Kinerja |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | > 90% | Sangat Tinggi |
| 2. | > 75% - 90% | Tinggi |
| 3. | > 65% - 75% | Sedang |
| 4. | > 50% - 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi per Triwulan | | | | Realisasi | Capaian | Keterangan |
|----|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | |
| | Tujuan | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Investasi Inklusif | Nilai Investasi | 1.282.684,4 Juta | 255.521,74 Juta | 1.366.117,99 Juta | 368.276,00 Juta | 638.877,94 Juta | 2.628.793,68 Juta | 204,94% | Renstra 2024-2026 |
| 2 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 10 Persen | -89,4 Persen | -32,4 Persen | -17,1 Persen | 9,5 Persen | 9,5 Persen | 95,00% | Renstra 2025-2029 |
| | Sasaran | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7% | -91% | -53% | -38% | 10% | 10% | 143,53% | Renstra 2024-2026 |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,004 Triliun Rupiah | 0,003 Triliun Rupiah | 0,005 Triliun Rupiah | 0,041 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 36,99% | Renstra 2025-2029 |
| 3 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 0,252 Triliun Rupiah | 1,363 Triliun Rupiah | 0,363 Triliun Rupiah | 0,598 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 103,21% | Renstra 2025-2029 |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 | - | 86,67 | - | 87,04 | 87,04 | 101,21% | Renstra 2025-2029 |

Sumber data : Release NSWI BKPM Triwulan I dan Rekapitulasi Manual LKPM Online s/d Triwulan IV 2025 dan DPMPSTSP Kabupaten Lumajang (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

1. Indikator kinerja tujuan awal terealisasi sebesar 2.628.793,68 Juta dengan capaian kinerja 204,94%;
2. Indikator kinerja tujuan setelah perubahan terealisasi sebesar 9,5 Persen dengan capaian kinerja 95 %.

❖ **Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi \geq 100% sebanyak 3 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 3. 3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No Tujuan | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | Meningkatnya Investasi Inklusif | Nilai Investasi | 1.282.684,4 Juta | 2.628.793,6 8 Juta | 204,94% |
| 2 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 10 Persen | 9,5 Persen | 95,00% |
| Sasaran | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7% | 10% | 143,53% |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 36,99% |
| 3 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 103,21% |

| | | | | | |
|---------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| No 4 | Tujuan/Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | Target 86,00 | Realisasi 87,04 | Capaian 101,21% |
|---------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|

Sumber data : Release NSWI BKPM Triwulan I dan Rekapitulasi Manual LKPM Online s/d Triwulan IV 2025 dan DPMPTSP Kabupaten Lumajang (data diolah)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebagai berikut :

a. Berdasarkan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebelum perubahan:

❖ Tujuan 1 : Meningkatnya Investasi Inklusif

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Nilai Investasi yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebelum perubahan sebesar 1.282.684,4 (Juta), terealisasi sebesar 2.628.793,68 (Juta) dengan capaian 204,94 % atau tergolong capaian kerjanya Sangat Tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 53.855,62 (Juta) ditambahkan dengan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2.574.938,06 (Juta), sehingga didapatkan total realisasi investasi sebesar 2.628.793,68 (Juta). Nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

❖ Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebelum perubahan sebesar 7 (%), terealisasi sebesar 10 (%) dengan capaian 143,53 % atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Jumlah kegiatan usaha pada tahun N dengan jumlah kegiatan usaha sebesar 637 Kegiatan Usaha dikurangi Jumlah kegiatan usaha pada tahun N-1 dengan jumlah kegiatan usaha sebesar 701

Kegiatan Usaha sehingga terdapat peningkatan sebesar 64 Kegiatan Usaha pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut dibagi Jumlah kegiatan usaha pada tahun N-1 dikali 100% dengan hasil akhir terdapat peningkatan sebesar 143,53 %, dimana jumlah kegiatan usaha tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

b. Berdasarkan Renstra PD Tahun 2025-2029:

❖ **Tujuan 1 : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Persentase Peningkatan Investasi yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 10 Persen, terealisasi sebesar 9,5 Persen dengan capaian 95 % atau tergolong capaian kinerjanya Sangat Tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Investasi Tahun 2025 sebesar 2,629 Triliun Rupiah dikurangi dengan Realisasi Investasi Tahun 2024 sebesar 2,400 Triliun Rupiah dibagi dengan Realisasi Investasi Tahun 2024 sebesar 2,400 Triliun Rupiah dikali 100. Nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

❖ **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Investasi PMA**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Investasi PMA yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 0,146 Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 0,054 Triliun Rupiah dengan capaian 36 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat rendah.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 0,054 Triliun Rupiah, nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

❖ **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Investasi PMDN**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Investasi PMDN yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 2,495

Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 2,575 Triliun Rupiah dengan capaian 103 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,575 Triliun Rupiah, nilai tersebut berasal dari penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada aplikasi LKPM *Online* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

❖ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal**

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 86 (angka), terealisasi sebesar 87,04 (angka) dengan capaian 101 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I ditambah Nilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II dibagi 2, nilai IKM tersebut didapat dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 20218-2023)

| NO | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----|--|---|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | T | R | C | T | R | C | T | R | C | T | R | C | T | R | C |
| 1 | Tujuan Meningkatkan Nilai Investasi | Nilai Investasi | 63.42 9,3 Juta | 63.42 9,3 Juta | 100% | 174.28 4,9 Juta | 174.28 4,9 Juta | 100% | 182.99 9,19 Juta | 61.2 75 Juta | 33,48 % | 192.14 9,15 Juta | 916.20 3,16 Juta | 477% | 788.33 4,24 Juta | 1.219.5 55,5 Juta | 155% |
| 2 | Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | a Nilai Investasi PMA | 38.31 4,5 Juta | 38.31 4,5 Juta | 100% | 1.991, 5 Juta | 1.991, 5 Juta | 100% | 2.091,1 0 Juta | 1.38 4 Juta | 66,19 % | 2.195,6 5 Juta | 31.610, 16 Juta | 1440 % | 1.047,8 4 Juta | 73.114, 9 Juta | 6978 % |
| 3 | Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | b Nilai Investasi PMDN | 25.11 4,8 Juta | 25.11 4,8 Juta | 100% | 172.29 3,4 Juta | 172.29 3,4 Juta | 100% | 180.90 8,09 Juta | 59.8 91 Juta | 33,11 % | 189.95 3,50 Juta | 884.59 3 Juta | 466% | 787.28 6,40 Juta | 1.146.4 40,6 Juta | 146% |
| 4 | Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | c Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86,13 | 86,13 | 100,0 0% | 86,00 | 86,33 | 100,3 8% | 86,50 | 86,5 7 | 100,0 8% | 87,00 | 87,60 | 100,6 9% | 87,50 | 86,27 | 98,59 % |

Tabel 3. 5
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

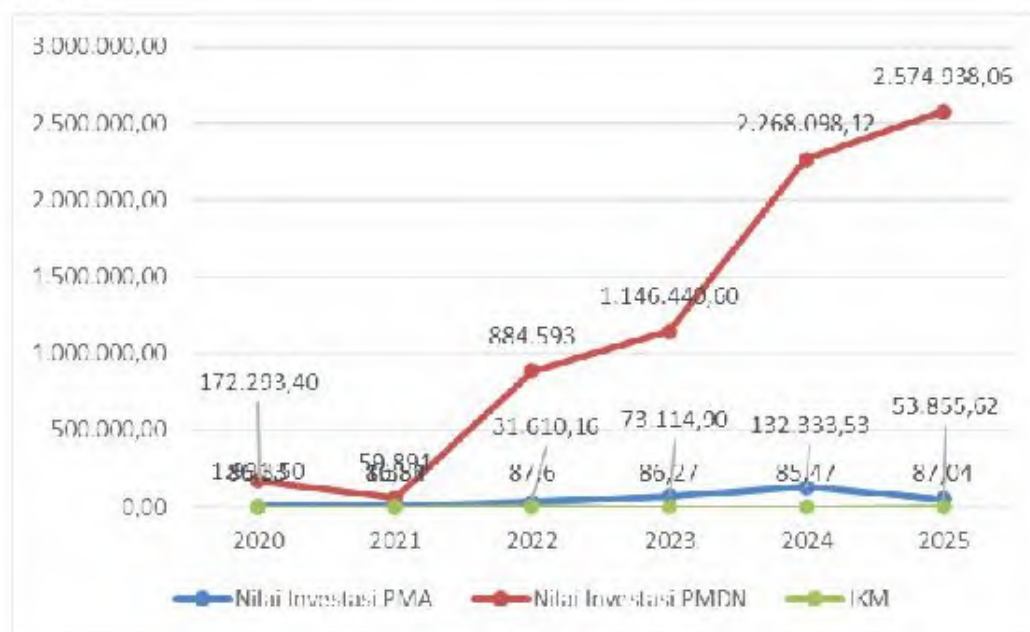
| NO | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|---|---|---------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Tujuan Meningkatnya investasi inklusif | Nilai investasi | 1.893.267,7 Juta | 2.171.259,46 Juta | 114,68% | 1.282.684,4 Juta | 2.628.793,68 Juta | 204,94% |
| 2 | Sasaran Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | a Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 5% | 11% | 219,20% | 7% | 10% | 143,53% |
| 3 | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | b Nilai Investasi PMA | 124.953,51 Juta | 123.251,33 Juta | 98,64% | 320.671 Juta | 53.855,62 Juta | 16,79% |
| 4 | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | c Nilai Investasi PMDN | 1.768.314,2 Juta | 2.048.008,13 Juta | 115,82% | 962.013,40 Juta | 2.574.938,06 Juta | 267,66% |
| 5 | Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | d Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 87,50 | 85,47 | 97,68% | 87,50 | 87,04 | 99,47% |

Tabel 3. 6
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

| NO | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | Tahun 2025 | | | KET |
|----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------|-----|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | Tujuan Meningkatnya investasi inklusif | Persentase Peningkatan Investasi | | 10 Persen | 9,5 Persen | 95,00% | |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMA | a | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 36,99% | |
| 3 | Meningkatnya Investasi PMDN | b | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 103,21% | |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | c | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86,00 | 87,04 | 101,21% | |

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 1 tujuan dan 4 sasaran strategis yang perlu dicapai, sedangkan pada pertengahan tahun tepatnya pada tribulan III terjadi perubahan acuan berdasarkan Renstra 2025-2029 sehingga Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 1 tujuan dan 3 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa indikator yang sama dari hasil evaluasi AKIP yaitu indikator Nilai Investasi PMA, Nilai Investasi PMDN dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi Penurunan sebesar 78 Miliar pada indikator Nilai Investasi PMA, kenaikan sebesar 307 Miliar pada indikator Nilai Investasi PMDN dan kenaikan sebesar 1,57 Angka pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal.

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1
Grafik Capaian Indikator per Tahun

Dari grafik terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat kenaikan hal ini dikarenakan oleh adanya peningkatan kegiatan usaha

seiring dengan mulai pulihnya ekonomi dimasa pandemi, sedangkan dari tahun 2021 ada penurunan yang cukup ekstrim hal ini dikarenakan puncak dari pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian pada indikator Nilai Investasi PMA, hal ini dikarenakan pergerakan pengembangan kegiatan usaha sudah cukup stabil jika dilihat dari peningkatan realisasi investasi pada tahun 2025 yang meningkat 9,5% dari realisasi tahun 2024.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Awal dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator | Target 2025 | Realisasi | Target Akhir Renstra | Capaian |
|----|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | Tujuan | | | | | |
| 1 | Tujuan Meningkatnya investasi inklusif | Nilai investasi | 1.282.684,4 Juta | 2.628.793,68 Juta | 1.374.304,74 Juta | 191% |
| | Sasaran | | | | | |
| 1 | Sasaran Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7% | 10 % | 9% | 112% |
| 2 | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMA | 320.671 Juta | 53.855,62 Juta | 41.229,14 Juta | 131% |
| 3 | Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMDN | 962.013,40 Juta | 2.574.938,06 Juta | 1.333.075,6 Juta | 193% |

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator | Target 2025 | Realisasi | Target Akhir Renstra | Capaian |
|----|--|--|-------------|-----------|-------------------------|---------|
| 4 | Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 87,50 | 87,04 | 88,50 | 98,35% |

Sumber data : Release NSWI BKPM Triwulan I dan Rekapitulasi Manual LKPM Online s/d Triwulan IV 2025 dan DPMPTSP Kabupaten Lumajang (data diolah)

Dari Table 3.7 terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Meningkatnya investasi inklusif dengan indikator Nilai investasi sudah melebihi target akhir renstra yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 191% dari target akhir renstra yang ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar dengan indikator Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha sudah melebihi target akhir renstra yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 112% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang dengan indikator Nilai Investasi PMA sudah melebihi target akhir renstra yang telah ditetapkan dengan capaian 131% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang dengan indikator Nilai Investasi PMDN telah mencapai target akhir renstra yang telah ditetapkan dengan capaian 193% dari target yang telah ditetapkan.

untuk sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 98,35% dengan capaian sebesar 87,04.

3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Perubahan Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir Renstra 2025 – 2029 :

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan Target Akhir
Renstra 2025-2029

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Target Akhir Renstra | Capaian |
|----|--|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | Tujuan | | | | | |
| 1 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 10 Persen | 9,5 Persen | 20 Persen | 48% |
| | Sasaran | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 0,305 Triliun Rupiah | 18% |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 5,232 Triliun Rupiah | 49% |
| 3 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86,0 | 87,04 | 87,25 | 99,76% |

Dari Table 3.8 terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi belum memenuhi target akhir renstra dengan capaian 48% dari target yang ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatkan Investasi PMA dengan indikator Nilai Investasi PMA belum memenuhi target akhir renstra yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 0,054 Triliun Rupiah dengan capaian 18% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatkan Investasi PMDN dengan indikator Nilai Investasi PMDN belum memenuhi target akhir renstra yang ditetapkan dengan capaian 49% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal belum memenuhi target akhir renstra yang ditetapkan 99,7% dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Provinsi Jawa Timur tampak sebagaimana Table 3.9 di bawah ini:

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
Standart Provinsi Jawa Timur

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Standar Provinsi Jawa Timur | Capaian |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Renstra 2024-2026 | | | | | | |
| 1 | Tujuan Meningkatnya Investasi Inklusif | Nilai Investasi | 1.282.684,4 Juta | 2.628.793,68 Juta | 111.000.000 Juta | 2,368% |
| 2 | Sasaran Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7% | 10,05% | Perbedaan Indikator | Tidak diketahui |
| Renstra 2025-2029 | | | | | | |
| 1 | Tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 10 Persen | 9,5 Persen | 4,3 Persen | 220,930% |
| 2 | Sasaran Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 41,07 Triliun Rupiah | 0,131% |
| 3 | Sasaran Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 69,93 Triliun | 3,682% |
| 4 | Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 | 87,04 | 88 | 98,9% |

Realisasi tujuan Meningkatkan Investasi Inklusif dengan indikator Nilai Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar provinsi yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sebesar 2,368% atau diperbandingkan dengan Kabupaten Situbondo dengan karakteristik yang sama, capaiannya belum dapat disajikan karena belum dipublikasikan.

Realisasi tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar provinsi yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Timur sebesar 220,930% atau diperbandingkan dengan Kabupaten Situbondo dengan karakteristik yang sama, capaiannya belum dapat disajikan karena belum dipublikasikan.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan/sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagian besar sudah memenuhi target dan ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yaitu sebanyak 33,33%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

a. Berdasarkan Renstra PD Tahun 2024-2026:

❖ Tujuan 1 : Meningkatnya investasi inklusif

Tujuan Meningkatnya investasi inklusif dengan indikator Nilai Investasi, capaian kinerja tahun ini sebesar 204,94% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 90,26% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 191%, hal ini didukung dengan adanya:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi;
- b. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun peta potensi investasi digital;
- b. Melaksanakan inovasi LILIN;
- c. Melakukan evaluasi kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal;
- d. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar

Sasaran Meningkatnya Investasi PMA dengan indikator Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha capaian kinerja tahun ini sebesar 10% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 75,67% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 112%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya ketersediaan potensi investasi yang siap dipromosikan;
- b. Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengoperasikan sistem informasi pelayanan publik
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Enggannya responden dalam merespon tautan yang dikirimkan oleh petugas;

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun peta potensi investasi digital;
- b. Melaksanakan inovasi LILIN;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada Penanam Modal.

b. Berdasarkan Renstra PD Tahun 2025-2029:

❖ **Tujuan 1** : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Tujuan Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi, capaian kinerja tahun ini sebesar 95 % (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 99 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 48%, hal ini didukung dengan adanya:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Belum optimalnya iklim investasi yang kompetitif.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi pemberian insentif/fasilitasi;
- b. Melakukan Fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kolaborasi strategis dengan OPD Teknis dan Asosiasi Pelaku Usaha.

❖ **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Investasi PMA

Sasaran Meningkatnya Investasi PMA dengan indikator Nilai Investasi PMA capaian kinerja tahun ini sebesar 37% (tidak tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 69% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 18%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terdapat Pelaku Usaha Asing yang tidak aktif berkegiatan usaha;
- b. Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan inovasi LILIN;
- b. Memberikan insentif atau fasilitas Penanaman Modal;
- c. Melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal.

❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Investasi PMDN

Sasaran Meningkatnya Investasi PMDN dengan indikator Nilai Investasi PMDN capaian kinerja tahun ini sebesar 103% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 14% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 49%, hal ini didukung dengan adanya:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;

- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Kurangnya tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dalam menyampaikan LKPM.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha.

❖ **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal capaian kinerja tahun ini sebesar 101% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 4% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 99%, hal ini didukung dengan adanya:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- c. Ketersediaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Sistem pelayanan secara daring.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. 1. Belum optimalnya prosedur layanan, produk layanan, penanganan pengaduan dan waktu pelayanan;
- b. 2. Enggannya responden dalam merespon tautan yang dikirimkan oleh petugas survei.

- c. Enggannya responden dalam merespon tautan yang dikirimkan oleh petugas;
- d. Tidak aktifnya nomor kontak responden yang telah dikirim tautan;
- e. Ketidakpercayaan responden atas pengirim tautan sehingga tautan tidak dibuka.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Penguataan kerjasama dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan;
- b. Melakukan sosialisasi melalui media publikasi resmi dinas;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan (rehabilitasi toilet pemohon).

3.1.2.1.1. Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10
Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

| No | Permasalahan | Akar Penyebab | Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya |
|----|---|--|--|
| 1 | Terdapat Pelaku Usaha Asing yang tidak aktif berkegiatan usaha | 1. Ketersediaan bahan baku produksi (industri kayu); 2. Ketersediaan lahan; 3. Kurangnya ketersediaan data potensi investasi daerah; 4. Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi potensi investasi Kabupaten Lumajang; | 1. Meningkatkan fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM; 2. Berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait penyediaan lahan usaha; 3. Melaksanakan penjangkaran data potensi investasi dengan bimbingan teknis penyusunan FS; 4. Menyelenggarakan kegiatan temu bisnis. |
| 2 | Belum memadainya kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal | 1. Insentif yang ditawarkan tidak spesifik pada potensi lokal Lumajang; 2. Standar kriteria yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan | 1. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanamn modal; 2. Berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait pemberian insentif/fasilitas penanaman modal |
| 3 | Kurangnya tingkat kepatuhan Pelaku | 1. Kurangnya pemahaman pelaku | 1. Meningkatkan diseminasi informasi terkait tata cara |

| No | Permasalahan | Akar Penyebab | Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya |
|----|---|---|--|
| | Usaha dalam menyampaikan LKPM | usaha dalam proses penyampaian LKPM 2. Belum terpenuhinya komitmen persyaratan perizinan yang melibatkan pihak lain oleh pelaku usaha 3. Kekawatiran pelaku usaha terhadap pengenaan pajak jika menyampaikan LKPM 4. Pergantian admin pelaporan LKPM pada perusahaan | penyampaian LKPM; 2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha; 3. Menyediakan fasilitas konsultasi terkait permasalahan dalam berkegiatan usaha. |
| 4 | Belum optimalnya prosedur layanan, produk layanan, penanganan pengaduan dan waktu pelayanan | Belum optimalnya upaya diseminasi informasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) | 1. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP); 2. Meningkatkan diseminasi informasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). |
| 5 | Enggannya responden dalam merespon tautan yang dikirimkan oleh petugas survei | Terdapatnya isu tautan berbahaya yang membahayakan keamanan informasi | Meningkatkan diseminasi informasi terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat |

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| | Tujuan | | | | |
| 1 | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | Persentase Peningkatan Investasi | 95,13% | 81,05% | 14,08% |
| | Sasaran | | | | |
| 1 | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 36,89% | 68,98% | -32,00% |
| 2 | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 103,20% | 76,04% | 27,17% |

| No. | Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 3 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 101,21% | 81,67% | 19,54% |

Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebesar Rp. 4.439.369.931 dan realisasinya sebesar Rp. 3.597.954.416 sehingga penyerapan anggaran sebesar 81,05%. Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 14,08%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai 95% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebesar Rp. 4.439.369.931 dan realisasinya sebesar Rp. 3.597.954.416 sehingga penyerapan anggaran sebesar 81,05%. Pada Tabel 3.8 ditunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja rata-rata sebesar 5%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai dengan sangat baik namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 74 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 36 Orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 48,65%. Meskipun demikian. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang disebutkan sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada saat ini dengan kondisi baik 47%, rusak 39% dan rusak berat 13%. Jika diperbandingkan antara rata-rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien atau perlu dilakukan penambahan / pemenuhan dan pemeliharaan.

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Realisasi Program dan Kegiatan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
|----|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--|--|------------------|------------------|-------------|--|
| 1 | Sasaran 1 Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah | 0,054 Triliun Rupiah | 36,99 % | Program 1 Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi | Realisasi Total Terhadap Target Investasi | 100 Persen | 99,5 Persen | 99,50 % | Menunjang secara langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Kegiatan 1 Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif | 10 Persen | 0 Persen | 0,00% | Menunjang secara tidak langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokum en | 1 Dokum en | 100,00 % | Menunjang secara tidak langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Sub Kegiatan 2 Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan | 1 Dokum en | 0 Dokum en | 0,00% | Menunjang secara tidak langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara |
|----|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|-----------------|-----------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
| | | | | | | Berbasis Resiko | Berusaha Berbasis Resiko | | | | |
| | | | | | | Kegiatan 2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun | Persentase Peta Potensi yang disusun | 17 Persen | 17 Persen | 100,00 % | Menunjang secara langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Sub Kegiatan 1 Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00% | Menunjang secara langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Sub Kegiatan 2 Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00 % | Menunjang secara langsung, dengan iklim penanaman yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi |
| | | | | | | Program 2 Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | 15,54 Persen | 16,15 Persen | 103,93 % | Menunjang secara langsung, dengan promosi penanaman modal yang tepat mampu meningkatkan jumlah investasi |
| | | | | | | Kegiatan 1 Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal | 83 Pelaku Usaha | 40 Pelaku Usaha | 48,19 % | Menunjang secara langsung, dengan promosi penanaman modal yang tepat mampu meningkatkan jumlah investasi |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---|--|--------------------|--------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
| | | | | | | Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50,00 % | Menunjang secara langsung, dengan promosi penanaman modal yang tepat mampu meningkatkan jumlah investasi |
| 2 | Sasaran 2 Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah | 2,575 Triliun Rupiah | 103,21 % | Program 1 Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | 58 Persen | 63 Persen | 108,62 % | Menunjang secara langsung, dengan pengendalian yang baik maka tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya dapat meningkatkan capaian realisasi investasi |
| | | | | | | Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal | 200 Kegiatan Usaha | 162 Kegiatan Usaha | 81,00 % | Menunjang secara langsung, dengan pengendalian yang baik maka tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya dapat meningkatkan capaian realisasi investasi |
| | | | | | | Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan | 200 Kegiatan Usaha | 112 Kegiatan Usaha | 56,00 % | Menunjang secara langsung, dengan terselesaikannya masalah dan hambatan pelaku usaha mampu meningkatkan capaian realisasi investasi |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
|----|---------|-------------------|---|---|-------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Usahanya | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan 2 Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 100 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | 100,00 % | Menunjang secara langsung, dengan pembinaan yang secara berkala dapat meningkatkan ketertiban pelaku usaha dalam memenuhi komitmen usahanya |
| | | | | | | Sub Kegiatan 3 Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian | 100 Kegiatan Usaha | 72 Kegiatan Usaha | 72,00 % | Menunjang secara langsung, dengan pengawasan yang baik mampu meningkatkan capaian realisasi investasi |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara |
|----|---|--|----|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
| | | | | | | | Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | |
| 3 | Sasaran 4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | 86 | 87,04 | 101,21 % | Program 1 Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko | 1 Persen | -21 Persen | - 21,00 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |
| | | | | | | Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang | Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 24.193 Izin | 16.881 Izin | 69,78 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |
| | | | | | | | Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan | 1.651 Non Izin | 1.471 Non Izin | 89,10 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |
| | | | | | | Sub Kegiatan 1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif | 2 Dokum en | 1 Dokum en | 50,00 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung |
|----|---------|-------------------|---|---|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan 2 Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 21.602 Pelaku Usaha | 15.261 Pelaku Usaha | 70,65 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |
| | | | | | | Sub Kegiatan 3 Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 140 Pelaku Usaha | 118 Pelaku Usaha | 84,29 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan |
| | | | | | | Sub Kegiatan 4 Terlaksananya | Jumlah Kegiatan Usaha | 40 Kegiat | 26 Kegiat | 65,00 % | Menunjang, dengan kemudahan pelayanan dan keramahan |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | T | R | C (%) | Menunjang Secara Langsung/Menunjang Secara Tidak Langsung | |
|----|---------|-------------------|---|---|-------|---|---|----------|----------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | an Usaha | an Usaha | | petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan | |

1. Tujuan 1 : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Indikator : Persentase Peningkatan Investasi, dengan target 10%, realisasi 9,5% dan capaiannya 95%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi PMA

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Investasi PMA dengan target 0,146 Triliun Rupiah realisasi 0,054 Triliun Rupiah dan capaiannya 37%. Sasaran ini ditunjang oleh 2 program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal sebagaimana dijabarkan berikut:

- 1) Program 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi yang diukur dengan indikator Realisasi Total Terhadap Target Investasi. Target untuk indikator ini adalah 100 Persen dan realisasi 99,5 Persen sehingga capaiannya 99,50%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN) dan Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi, disamping itu terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu Kurangnya ketersediaan data potensi investasi daerah dan telah terjalinnya kemitraan perusahaan besar dengan perusahaan besar lain di luar Kabupaten Lumajang sehingga tidak membutuhkan kemitraan dengan UMKM di Kabupaten Lumajang.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang yang diukur dengan indikator Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif

dengan target 10% dan realisasi 0% sehingga capaiannya 0%. Hal ini tidak tercapai karena kurangnya minat pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pemberian insentif yang disebabkan oleh tidak semua pelaku usaha memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah, pelaku usaha masih mampu melakukan pembayaran pajak daerah, belum adanya pelaku usaha yang melakukan pengembangan usaha dan pelaku usaha belum mampu memenuhi persyaratan pengajuan pemberian insentif.

- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun yang diukur dengan indikator Persentase Peta Potensi yang disusun dengan target 17 Persen dan realisasi 17 Persen sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena komitmen dan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah dalam menyediakan data potensi investasi di kabupaten Lumajang.
- 2) Program 2 Program Promosi Penanaman Modal, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal yang diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi. Target untuk indikator ini adalah 15,54 Persen dan realisasi 16,15 Persen sehingga capaiannya 103,93%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN) dan Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi, disamping itu terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dalam mendukung promosi penanaman modal salah satunya belum tersusunnya dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) potensi investasi di Kabupaten Lumajang.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang yang diukur dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target 83 Pelaku Usaha dan realisasi 40 Pelaku Usaha sehingga capaiannya 48,19%. Target kinerja belum dapat tercapai dimana terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Mengikuti Pameran Potensi Investasi yang disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang sasaran Meningkatnya Investasi PMA mempunyai capaian kinerja yang baik, namun belum mampu meningkatkan capaian kinerja Sasaran sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan capaian sasaran.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi PMDN

Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Investasi PMDN dengan target 2,495 Triliun Rupiah realisasi 2,575 Triliun Rupiah dan capaiannya 103% ditunjang oleh 1 program yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang diukur dengan indikator Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal. Target untuk indikator ini adalah 58 Persen dan realisasi 63 Persen sehingga capaiannya 108,62%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN) dan Konsisten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, disamping itu terdapat kendala/permasalahan yang dihadapi yaitu Pelaku usaha belum memenuhi komitmen persyaratan

perizinan yang melibatkan pihak lain sehingga tidak melaksanakan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang yang diukur dengan indikator Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal dengan target 200 Kegiatan Usaha dan realisasi 162 Kegiatan Usaha sehingga capaiannya 81%. Hal ini tidak tercapai karena terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Kementerian Investasi/BKPM melalui LKPM *Online*.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal dengan target 86 realisasi 87,04 dan capaiannya 101% ditunjang oleh 1 program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diukur dengan indikator Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berbasis risiko. Target untuk indikator ini adalah 1 Persen dan realisasi -21 Persen sehingga capaiannya -21%. Indikator program ini belum tercapai targetnya disebabkan oleh beberapa hambatan:

- 1) Berkurangnya permohonan penerbitan izin usaha berbasis risiko; dan
- 2) Terdapat beberapa pemohon yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi pelayanan publik di DPMPTSP.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang yang diukur dengan 2 indikator yaitu:

- Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan dengan target 24.193 Izin dan realisasi 16.881 Izin sehingga capaiannya 69,78%;
- Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan dengan target 1.651 Non Izin dan realisasi 1.471 Non Izin sehingga capaiannya 89,10%.

Kedua indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, hambatan yang dialami adalah Berkurangnya permohonan penerbitan izin usaha berbasis risiko dan terdapat beberapa pemohon yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi pelayanan publik di DPMPTSP serta adanya penarikan kewenangan penerbitan non izin yaitu izin sektor ketenagakerjaan ke kemenaker yang mempengaruhi tingkat permohonan Non Izin.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program yang menunjang sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal mempunyai capaian kinerja yang sangat rendah, maka capaian kinerja sasaran tersebut kurang meskipun sudah cukup tinggi.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.439.369.931,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 3.597.954.416,- atau sebesar 81,05%. Dengan rincian pada Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Realisasi Anggaran Tahun 2025

| Kode | Program | Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian |
|-------|---|---------------|--------------------|---------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 127.070.750 | 112.973.000 | 88,91% |
| 2 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 44.648.000 | 5.483.500 | 12,28% |
| 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 103.763.250 | 78.899.500 | 76,04% |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 351.841.792 | 337.767.600 | 96,00% |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.812.046.138 | 3.062.830.816 | 80,35% |
| TOTAL | | 4.439.369.930 | 3.597.954.416 | 81,05% |

Tabel 3. 14
Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Tahun Tahun Sebelumnya

| No | Program | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | 2025 (Rp) |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 64.226.000 | 39.067.000 | 26.625.000 | 193.759.250 | 127.070.750 |
| 2 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 84.400.000 | 62.068.000 | 39.666.000 | 69.015.750 | 44.648.000 |
| 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 394.353.900 | 405.525.010 | 361.724.850 | 444.037.000 | 103.763.250 |
| 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 314.443.000 | 262.307.000 | 326.653.104 | 451.783.000 | 351.841.792 |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | 2.539.412.460 | 4.466.253.312 | 3.331.196.689 | 3.588.812.058 | 3.812.046.138 |

3.3. CAPAIAN KINERJA LAIN

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mempunyai kinerja lain yaitu RB Tematik Investasi. Rencana Aksi disajikan dalam bentuk table pada Tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3. 15
 Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| No | Indikator Kinerja Utama | Rencana Aksi | Indikator | Satuan | Formulasi | Target | Realisasi | Keterangan |
|----|------------------------------|--|---|---------|--|--------|-----------|------------|
| 1 | Meningkatnya nilai investasi | Melakukan pemasaran investasi daerah melalui Upaya Branding dan publikasi Investasi | Jumlah kegiatan Temu Bisnis yang dilaksanakan / diikuti | Dokumen | Dokumen kegiatan temu bisnis yang dilaksanakan/diikuti | 1 | 1 | |
| | | Menyiapkan sarana dan prasarana promosi investasi melalui penyusunan Peta Potensi berbasis Digital | Jumlah Peta Potensi Investasi Digital yang disusun | Dokumen | Kajian Peta Potensi Investasi yang disusun | 1 | 1 | |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- a. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- b. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- c. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- d. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

3.3.2. Penghargaan

Selain itu pada Tahun 2025 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil memperoleh beberapa penghargaan yaitu menerima Penghargaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terbaik dari BAZNAS Kabupaten Lumajang yang diberikan oleh Bupati Lumajang pada hari Kamis 25 September 2025 bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang.



Gambar 3. 2
Penghargaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terbaik Tahun 2025

3.3.3. Inovasi

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain :

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Layanan SIAP-SAJI (akSI Pelayanan Perizinan LangSung Jadl) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan

berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).

- c. Pelaksanaan kegiatan NGOPI SINI (Monggo Mampir Kami Siap Melayani), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten Lumajang;
2. Melakukan pemenuhan dan pengisian data potensi investasi pada peta potensi investasi digital;
3. Melaksanakan reviu atas kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanaman modal;
4. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM;
5. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi pada seluruh media publikasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu:

1. Meningkatkan fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM;
2. Melaksanakan penjaringan data potensi investasi dengan bimbingan teknis penyusunan FS;
3. Menyelenggarakan kegiatan temu bisnis dan pameran.
4. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan pemberian insentif/fasilitas penanamn modal;
5. Meningkatkan diseminasi informasi terkait tata cara penyampaian LKPM;
6. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha;
7. Menyediakan fasilitas konsultasi terkait permasalahan dalam berkegiatan usaha.
8. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
9. Meningkatkan diseminasi informasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)
- ❖ MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUSTAJIB, A.Ma.PKB, S.H.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



MUSTAJIB, A.Ma.PKB, S.H.
NIP. 19730410 199703 1 005

Lumajang, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal Skala Kecil, Menengah dan Besar | Persentase Peningkatan Kegiatan Usaha | 7 % |
| 2. | Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMA | 320.671 Juta |
| 3. | Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang | Nilai Investasi PMDN | 962.013,4 Juta |
| 4. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 87,50 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|----------------------|------------|
| 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp. 147.735.750,48 | DAU |
| 2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp. 167.581.000,00 | DAU |
| 3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp. 112.407.500,00 | DAU |
| 4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Rp. 392.833.584,00 | DAU |
| 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3.669.540.501,10 | DAU |
| JUMLAH | Rp. 4.490.098.335,58 | |

BUPATI LUMAJANG



Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 03 Maret 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MUSTAJIB, A.Ma.PKB, S.H.
NIP. 19730410 199703 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. PAIMAN**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.



Lumajang, 31 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | 0,146 Triliun Rupiah |
| 2. | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | 2,495 Triliun Rupiah |
| 3. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | 86 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|-----------------------------|------------|
| 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Rp. 127.070.750,48 | DAU |
| 2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Rp. 44.648.000,00 | DAU |
| 3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Rp. 103.763.250,00 | DAU |
| 4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Rp. 351.841.792,00 | DAU |
| 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3.812.046.138,10 | DAU |
| JUMLAH | Rp. 4.439.369.930,58 | DAU |



BUPATI LUMAJANG
Ir. HAINDAH AMPERAWATI, M.Si.

Lumajang, 31 Oktober 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Ir. FAIMAN
 NIP. 19670606 199202 1 001

Tabel 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1) | TUJUAN (2) | SASARAN (3) | INDIKATOR (4) | FORMULASI (5) | DEFINISI OPERASIONAL (6) | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERA NGAN (13) |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | 2025 (7) | 2026 (8) | 2027 (9) | 2028 (10) | 2029 (11) | 2030 (12) | |
| Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif | Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif | | Persentase Peningkatan Investasi | Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100 | Pengukuran kenaikan nilai investasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase (tahunan) | Persen | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| | | Meningkatnya Investasi PMA | Nilai Investasi PMA | Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) | Nilai Investasi PMA adalah biaya atau pengeluaran perusahaan asing untuk menjalankan aktivitas bisnisnya berupa modal tetap dan modal kerja berdasarkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui aplikasi LKPM Online | Triliun Rupiah | 0,146 | 0,163 | 0,186 | 0,216 | 0,254 | 0,305 | |
| | | Meningkatnya Investasi PMDN | Nilai Investasi PMDN | Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Nilai Investasi PMDN adalah biaya atau pengeluaran perusahaan dalam negeri untuk menjalankan aktivitas bisnisnya berupa modal tetap dan modal kerja berdasarkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal | Triliun Rupiah | 2,495 | 2,794 | 3,185 | 3,695 | 4,360 | 5,232 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI | DEFINISI OPERASIONAL | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN | |
|-------------------------------------|--------|--|---|--|--|--------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------------|--|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| | | | | | (LKPM) yang disampaikan melalui aplikasi LKPM Online | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal | Hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara terpadu oleh Bagian Organisasi dan periodik (Semesteran), dengan Nilai Interval Konversi berdasar Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 : 1. 25 - 64,99 (D-Tidak Baik) 2. 65 - 76,60 (C-Kurang Baik) 3. 76,61 - 88,30 (B-Baik) 4. 88,31 - 100 (A-Sangat Baik) | Angka | 86 | 86,25 | 86,5 | 86,75 | 87 | 87,25 | | |

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pelayanan SIAP SAJI ke Desa

DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

siap saji
AKSI PELAYANAN PERIZINAN LANGSUNG JADI NIB
NOMOR INDIK BERUSAHA

SETOR MADU KECAMATAN SUMBERSUKO NIB KUNCI LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN USAHA SEKALIGUS PINTU AKSES BERBAGAI PROGRAM PEMERINTAH, KEMUDAHAN PERIZINAN DAN PELUANG MODAL

GRATIFIKASI

www.dpmpdsp.lumajangkab.go.id | @dpmpdsp_lumajangkab | #bangga_melayani_bangsa

HADIR DI SETOR MADU 21 KECAMATAN

SETOR MADU KECAMATAN PADANG MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK LINTAS OPD LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

AKSI PELAYANAN PERIZINAN LANGSUNG JADI NIB
NOMOR INDIK BERUSAHA

DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN

www.dpmpdsp.lumajangkab.go.id | @dpmpdsp_lumajangkab | #bangga_melayani_bangsa



HARI KE-1

SELASA, 22 APRIL 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, Mengadakan kegiatan Fasilitasi Pendaftaran dan Perolehan NIB bagi Usaha Mikro Kecil. Hari Selasa & Kamis, 22 Dan 24 April 2025 Mulai Pukul 09.00 - 14.30 Bertempat Di Balai Desa Sukorejo



Fasilitasi Kunjungan Calon Investor PMA Srilanka



Kegiatan Business Meeting



Rapat Tim Percepatan Investasi



Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id, Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

**PERBANDINGAN NILAI REALISASI INVESTASI
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHUN 2025**

| TRIWULAN | TAHUN 2024 | | | TAHUN 2025 | | | KETERANGAN |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | NILAI INVESTASI PMA | NILAI INVESTASI PMDN | NILAI INVESTASI | NILAI INVESTASI PMA | NILAI INVESTASI PMDN | NILAI INVESTASI | |
| I | 231.000.092 | 1.318.669.200.000 | 1.318.900.200.092 | 4.000.572.159 | 251.521.171.629 | 255.521.743.788 | Sumber Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TW I |
| II | 26.173.313.848 | 400.511.864.527 | 426.685.178.375 | 3.259.150.000 | 1.362.858.843.435 | 1.366.117.993.435 | Sumber Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TW II |
| III | 3.543.891.274 | 85.087.994.919 | 88.631.886.193 | 5.359.679.135 | 362.916.318.219 | 368.275.997.354 | Sumber Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TW III |
| IV | 102.385.326.147 | 463.829.064.725 | 566.214.390.872 | 41.236.218.553 | 597.641.725.785 | 638.877.944.338 | Rekapitulasi manual penyampaian LKPM TW IV 2025 s/d 10 Januari 2026 |
| TOTAL | 132.333.531.361 | 2.268.098.124.171 | 2.400.431.655.532 | 53.855.619.847 | 2.574.938.059.068 | 2.628.793.678.915 | |

Persentase peningkatan Investasi
$$\frac{(\text{Nilai Investasi Tahun } n - \text{Nilai Investasi Tahun } n-1)}{\text{Nilai Investasi Tahun } n-1} \times 100\%$$
$$\frac{(2.628.793.678.915,00 - 2.400.431.655.531,98)}{2.400.431.655.531,98}$$
$$= 9,51 \text{ Persen}$$

Lumajang, 10 Januari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NIP. 195706061992021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 29 Desember 2025

Nomor : 000.8.3.4/171/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 2 Tahun 2025

Yth. Kepala DPMPTSP
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/10/427.16/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Semester 2 Tahun 2025 :
Versi Permenpan RB : 90,74
Versi Pedoman MCP KPK : 86,46
 - b. Tahun 2025 (rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2)
Versi Permenpan RB : 87,04
Versi Pedoman MCP KPK : 84,82
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 3, yaitu :
1) Prosedur Pelayanan, 2) Produk Pelayanan, 3) Penanganan Pengaduan
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 3, yaitu :
1) Waktu Pelayanan, 2) Biaya/ Tarif, 3) Perilaku Pelaksana

- c. Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.
5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari pengguna layanan yang menjadi responden tersampling yang telah dilakukan inventarisasi oleh Bagian Organisasi, yaitu : Nihil.

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. Memublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 2, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 1 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 31 Desember 2025** melalui <https://bit.ly/LAP-SKM-SEMESTER-2-2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. Merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2. di atas **dalam kesempatan pertama**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.



Sekretaris Daerah,



Agus Triyono



Tembusan:
Bupati Lumajang.

Tangkap Layar Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Tahun 2025

BERANDA
PELAPORAN
PENGADUAN
PENCABUTAN
SANKSI
PENJADWALAN
PROFILE

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| 46 | 77-03-2024 | LK0990851 KONSTRUKSI (Triwulan I 2024) | (PM/DN) NIB: | Perizinan Berusaha: NIB: Nomor Kegiatan Usaha: KBLI: 4639 Lokasi Proyek: Alamat : Jalan Lingkar Timur Dusun Reban Kelurahan Sumberaji Kecamatan Sekeloa (SS08) Kab/kota Kab. Lumajang Provinsi : Jawa Timur Proyek inline: Tidak Tingkat Risiko: Rendah Status SS: NIB Terbit Persyaratan Dasar | Modal Tetap: 0 Modal Kerja: 45.000.000.000 Total Rencana: 45.000.000.000 | TKI: 0 TKA: 0 Total: 0 | Modal Tetap: 185.000.000 Modal Kerja: 30.000.000.000 Total: 30.185.000.000 | TKI: 0 TKA: 0 | Laporan LKPM CETAK KIRIM BWA |
|----|------------|--|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---|

BERANDA
PELAPORAN
PENGADUAN
PENCABUTAN
SANKSI
PENJADWALAN
PROFILE

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 2 | 04-07-2024 | LK000944 PRODUKSI (Triwulan I 2024) | (PM/DN) NIB: | OSS II Perizinan Berusaha: No Izin Nomor Kegiatan Usaha: KBLI: 4021 Lokasi Proyek: Alamat : Jl. Raya Randugung, Dusun Krayan RT. DS RW. 01 Kelurahan : Kudus Kecamatan Krayan (SS08) Kab/kota : Kab. Lumajang Provinsi : Jawa Timur Proyek inline: Tidak Tingkat Risiko: | Modal Tetap: 21.865.000.908 Modal Kerja: 1.350.000.000 Total Rencana: 23.215.000.908 | TKI: 22 TKA: 0 Total: 22 | Modal Tetap: 31.963.009.434 Modal Kerja: 0 Total: 31.963.009.434 | TKI: 4 TKA: 0 | Laporan LKPM CETAK LKPM KIRIM EMAIL BWA |
|---|------------|---|-----------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|



OSS

BERANDA

PELAPORAN

PENGADUAN

PENCABUTAN

SANKSI

PENCIADWALAN

PROFILE

17

10-10-2024

LK1370008
KONSTRUKSI
(Tinjauan II)
2024

(PMON)

NIB:

Perizinan Berusaha:
No Izin:
Nomor Kegiatan Usaha:

Modal Tetap:
4.750.000.000
Modal Kerja:
50.000.000
Total Rencana:
[4.800.000.000](#)

TKI:
27
TKA:
0
Total:
27

Modal Tetap:
8.420.743.801
Modal Kerja:
6.342.506.364
Total:
[14.763.250.165](#)

TKI:
9
TKA:
0

[Tinjauan](#)

[Balas](#)

- Lihat
- Cetak LK
- Kirim Email
- Berkas

KBL:
4560
Lokasi Proyek:
Alamat: Jl. LINTAS
TIMUR NO. 99
Kecamatan:
Jogoyudan
Kecamatan:
Lumajang
(SDB) Kabupaten:
Kab. Lumajang
Provinsi: Jawa Timur
Proyek Inline:
Tidak
Tingkat Risiko:
Tinggi
Status Izin:
NIB
bertahap+Menunggu
verifikasi penempatan



OSS

BERANDA

PELAPORAN

PENGADUAN

PENCABUTAN

SANKSI

PENCIADWALAN

PROFILE

106

06-01-2025

LK1403541
KONSTRUKSI
(Tinjauan IV)
2024

(PMON)

NIB:

Perizinan Berusaha:
No Izin:
Nomor Kegiatan Usaha:

Modal Tetap:
4.750.000.000
Modal Kerja:
50.000.000
Total Rencana:
[4.800.000.000](#)

TKI:
27
TKA:
0
Total:
27

Modal Tetap:
8.841.487.602
Modal Kerja:
6.342.506.364
Total:
[15.183.993.966](#)

[Tinjauan](#)

[Balas](#)

- Lihat
- Cetak LK
- Kirim Email
- Berkas

KBL:
4560
Lokasi Proyek:
Alamat: Jl. LINTAS
TIMUR NO. 99
Kecamatan:
Jogoyudan
Kecamatan:
Lumajang
(SDB) Kabupaten:
Kab. Lumajang
Provinsi: Jawa Timur
Proyek Inline:
Tidak
Tingkat Risiko:
Tinggi
Status Izin:
NIB
bertahap+Menunggu
verifikasi penempatan